



## Koneksi Antar Destinasi bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas

Erdi, Sukamto, Ahirul Habib Padilah

Universitas Tanjungpura, Pontianak, 78124, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: January 05, 2023  
Revised: July 17, 2022  
Available online: September 01, 2023

### KEYWORDS

Border Tourism, Tour Packages, Willingness to Pay, Connections Between Destinations.

### CORRESPONDENCE

Name: Ahirul Habib Padilah  
E-mail: [ahirul.habib@fisip.untan.ac.id](mailto:ahirul.habib@fisip.untan.ac.id)

### A B S T R A C T

One source of regional income that has the potential to be developed is the tourism sector. Currently, the central government is also focusing on promoting tourism as a potential source of economic growth. When the regions do this, it will become a synergy with central policy. National and regional economic development through tourism is believed to contribute to income. This research uses a descriptive qualitative research method with three main studies namely library research, field studies and documentation research with 5 (five) informants, namely sub-district heads, village heads, traditional leaders and administrators, business actors, and The community at the destination. The Results where the destination has no significant impact on regional revenue from this sector. As if it read only hotels and restaurants contribute to local revenue. Therefore, this conclusion is unfair. Therefore, each region is required to be able to explore and manage its tourism potential as a source of income to finance regional expenditures. Sambas Regency as one of the regencies in West Kalimantan Province; has potential tourism resources that are known not only for the beauty and uniqueness of nature, but also for fame as a beautiful area at the end of the country. The conclusion is The local government of Sambas Regency is still unable to catch them opportunities to attract PAD from tourist activities because until recently, these opportunities were missed never realized.

### PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam pengelolaan destinasi wisata dan pengembangan koneksi antar destinasi. Tanpa dukungan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah, sulit untuk mencapai pertumbuhan pendapatan asli daerah yang signifikan dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata masuk dalam urusan pilihan. Pilihan itu disebabkan oleh adanya potensi pengembangan berdasarkan keunggulan komperatif daerah (Gamal, 2004). Pembangunan kepariwisataan daerah menjadi penting dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat keunggulan daerah lebih difahami oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan pemahaman itu, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah agar potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal dapat dioptimalkan (Anggraheni et al., 2022; Herizal et al., 2021; Pitana, 2005).

Melalui otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan (Fauzi, 2019; Djakaria M Nur, 2016).

Sektor pariwisata diharapkan dapat menggantikan penerimaan negara yang bersumber dari produksi minyak dan gas bumi (Nur, 2016). Peranan sektor pariwisata pada tahun 1985 masih menduduki peringkat kelima dalam menghasilkan

devisa setelah migas, kayu, karet dan tekstil (Yoety, 2008). Sedangkan pada tahun 1990 menduduki urutan keempat setelah migas, tekstil dan kayu (Arifin, 2012). Tahun 2022 ini, sektor pariwisata menduduki posisi ketiga setelah migas dan perkebunan. Di daerah, sektor ini menjadi salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan sektor pariwisata daerah memungkinkan dilakukan oleh pemerintah daerah karena didukung oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menyebutkan bahwa keberadaan obyek wisata pada suatu daerah tidak hanya akan menguntungkan daerah tetapi juga nasional dalam kerangka nasional. Manfaat itu antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan lingkungan, memperkukuh jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air (Asmarani et al., 2013; Sabahan, & Yuliansyah, 2017; Dewi et al., 2021).

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menitipkan pesan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa, salah satu tujuan dan sasaran misi pemerintah daerah dalam bidang pariwisata adalah ingin mengembangkan sektor pariwisata dan budaya menjadi lebih maju, terarah dan produktif. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Provinsi Kalimantan secara berturut-turut mengeluarkan tiga Perda terkait pariwisata: Perda No. 3 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; Perda No. 1 tahun 2020 tentang pramuwisata dan Perda No. 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan. Dengan hadirnya tiga Perda di atas, menunjukkan bahwa sektor ini penting untuk digarap oleh pemerintah daerah (Mayasari, 2021; Syaifullah, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan melalui dinas pariwisata saat ini masih tergolong kecil, namun perputaran uang dari aktivitas kepariwisataan sangat besar

sehingga pemerintah seyogyanya tidak hanya menghitung besaran PAD, tetapi juga menghitung dampak ekonomi melalui perputaran uang dan kegiatan ekonomi masyarakat dari aktivitas kepariwisataan di daerah (Erdi, 2011). Di Kalbar, *trend* retribusi daerah yang salah satunya disumbang oleh sektor pariwisata memang tergolong kecil, kontribusinya sekitar 2,85 sd 4,45% dari APBD, sehingga memerlukan penguatan secara kelembagaan dan sistematis. Salah satu kawasan yang dapat dijadikan sebagai titik balik bagi masuknya turis ke Indonesia adalah melalui jalur darat Post Lintas Batas Negara (PLBN) yang terdapat di beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang dan Kapuas Hulu, sementara perbatasan di Kabupaten Sintang masih belum layak dijual melalui pariwisata. Mengingat keberadaan PLBN itu ada di Kabupaten, maka semestinya pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan peluang itu untuk memberikan *income* kepada daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah dari aktivitas turis di destinasi pada kawasan perbatasan yang terhubung dengan destinasi-destinasi lainnya di kabupaten (Saputra, 2017; Yadi, et al., 2014).

Selain daya tarik wisata yang diterangkan di atas, masih banyak daya tarik wisata potensial lainnya yang dapat dikelola untuk menjadi daerah tujuan wisata. Ripparda menginstruksikan kepada setiap daerah untuk menentukan 5 destinasi unggulan yang dilakukan bersama antara daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Namun kenyataannya beberapa potensi-potensi daya tarik wisata yang ada itu masih belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang mengurus sektor pariwisata.

Melihat dari hal tersebut, sektor pariwisata yang berada di kabupaten ini mendapatkan banyak sorotan. Namun, masih banyak kendala dan kekurangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan PAD. Untuk itu perlu diketahui apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan pariwisata yang guna meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Riset ini diharapkan memberikan sinergi untuk menggarap potensi destinasi melalui pengelolaan secara baik agar dapat berkontribusi pada pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, et al., (2020), berjudul Pengaruh Pengunjung Lokasi Pariwisata terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Temajak Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, menggunakan metode deskriptif dengan hasil penelitian bahwa pengaruh pengunjung tempat wisata terhadap pendapatan masyarakat desa Temajak sebesar 52,8% yang berarti cukup memadai. Sementara penelitian ini ingin menemukan solusi bagaimana destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Sambas bisa terkoneksi melalui dorongan Pemerintah Daerah, sehingga destinasi seperti yang ada di Temajak dan desa serta kecamatan lainnya bisa saling mendukung untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sambas.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yang ingin dijawab melalui riset ini, yakni: (1) Koneksi PLBN dengan destinasi lainnya di Kabupaten Sambas masih belum terlaksana; (2) Terjadi *lost income* karena PLBN tidak termanfaatkan untuk menarik *willingness to pay* yang telah disediakan turis karena waktu tinggal turis di Kabupaten Sambas tidak optimal. (3) Kerangka kebijakan untuk menarik WTP dan memperlama waktu tinggal turis di destinasi. Rumusan di atas dihubungkan dengan PLBN Sambas sebagai

destinasi awal yang sudah eksis dan diharapkan terkoneksi dengan destinasi lain dalam kerangka *cross border wonderful* Indonesia.

## METODE

Penelitian ini diawali dari kawasan Border Sambas. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan masalah secara apa adanya (*das sein*) dan bukan sebagaimana mestinya (*das sollen*) (Miles, 2014). Menurut Nazir (2014), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena-fenomena.

Penelitian ini menggunakan tiga studi, yakni studi kepustakaan (*library research*), studi lapangan (*field research*), dan Riset dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Para Kepala Desa yang di desanya terdapat destinasi wisata, Ketua dan pengurus adat di wilayah destinasi, Pelaku usaha yang bersentuhan dengan destinasi, dan Masyarakat di destinasi, untuk memetakan model kerjasama yang dapat mereka dukung dalam konteks penataan dan pengelolaan destinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sambas merupakan wilayah yang terletak di bagian paling Utara Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, Kabupaten Sambas pada bagian utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Lau Natuna. Pada bagian selatan berbatasan dengan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Sarawak. Pada bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna. Kabupaten Sambas ini sendiri terdiri dari 19 kecamatan, 193 desa, 594 dusun.

Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintahan Sambas merupakan daerah *Afdelling Van Singkawang* atau wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat kabupaten. Setelah perang dunia ke-2 status Kabupaten Sambas berubah menjadi *Afdelling Administratif* yang terbagi menjadi 3 (tiga) daerah, yakni:

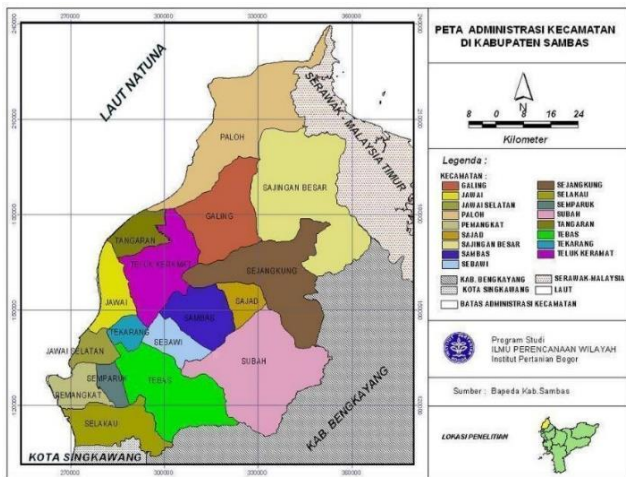
1. Daerah Kesultanan Sambas yang meliputi Onderafdeling Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas dengan sebutan kewedanan.;
2. Daerah Kerajaan/Penembahan Mempawah;
3. Daerah Kerajaan (Kesultanan) Pontianak dan sebagian daerahnya adalah Mandor.

Singkawang yang terdiri dari 4 (empat) kewedanan yaitu Kewedanan Singkawang, Kewedanan Bengkayang, Kewedanan Pemangkat, dan Kewedanan Sambas. Pembentukan Kabupaten Sambas mulai terealisasi dan sejak tahun 1963 sistem kewedanan dihapuskan sehingga wilayah Pemerintahan Kabupaten Sambas berubah menjadi 15 wilayah kecamatan, dan pada tahun 1988 berubah menjadi 19 kecamatan dimana 2 kecamatan, di antaranya Kota Administratif Singkawang.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang maka kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pindah dari

Kota Singkawang ke Kota Sambas, sehingga wilayah Kabupaten Sambas menjadi 9 Kecamatan saja. Pada tahun 2007, wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan kembali menjadi 19 Kecamatan dengan kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tangaran, Selakau Timur dan Salatiga yang berasal dari pemekaran Kecamatan Teluk Keramat, Selakau dan Pemangkat. Untuk dapat mencapai Kabupaten Sambas terdapat beberapa Jalan Nasional yang dapat dilalui, seperti Jalan Nasional Pontianak-Sambas, yang merupakan salah satu akses untuk menuju Kabupaten Sambas melalui Kota Pontianak dengan jarak sekitar 227 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam perjalanan.

Jalan Nasional Singkawang-Sambas merupakan salah satu akses untuk menuju Kabupaten Sambas melalui Kota Singkawang dengan jarak sekitar 77 km atau waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Selain itu, jika menempuh perjalanan melalui Kota Kuching (Malaysia) dengan jalur darat, maka jarak yang ditempuh sekitar 196 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan. Perjalanan melalui Kuching (Malaysia) ini akan melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang berada di Desa Sebunga wilayah Kecamatan Sajingan Besar.



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2022  
 Sumber: Bappeda Kabupaten Sambas, 2021

Penduduk Kabupaten Sambas tercatat berjumlah 639,739 jiwa. Agama Islam merupakan agama yang mendominasi masyarakat Kabupaten Sambas, terlihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 563.778 jiwa, disusul dengan penduduk yang beragama Buddha berjumlah 42.430 jiwa, Katolik berjumlah 18.507 jiwa, dan Protestan 11.791 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Sambas sekitar 100 jiwa per kilometer persegi. Penduduk laki-laki berjumlah 326.168 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 311.643 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk paling banyak merupakan Desa Tebas dengan total penduduk mencapai 81.223 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit merupakan Desa Selakau Timur dengan total penduduk hanya 12.629 jiwa (BPS, 2022).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	29 081	27 384	56 465
5-9	28 736	27 597	56 333
10-14	29 138	27 239	56 377
15-19	27 656	26 258	53 914
20-24	26 331	24 873	51 204
25-29	25 440	23 403	48 843
30-34	26 510	23 430	49 940
35-39	27 106	24 328	51 434
40-44	24 708	23 133	47 841
45-49	22 199	20 812	43 011
50-54	17 486	16 329	33 815
55-59	13 650	13 849	27 499
60-64	10 853	12 043	22 896
65-69	8 463	9 310	17 773
70-74	4 705	5 766	10 471
75+	4 106	5 889	9 995
<b>Kabupaten Sambas</b>	<b>326 168</b>	<b>311 643</b>	<b>637 811</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2022

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas dalam Angka 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Sambas sebesar 637.811 jiwa yang terdiri dari 326.168 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 311.643 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sajingan Besar sebesar 100 jiwa/Km<sup>2</sup>. Penduduk di Kecamatan Sajingan Besar ini didominasi oleh usia produktif dengan rentan usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk 430.397 jiwa. Di mana penduduk usia tersebut dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam proses produksi dalam kegiatan ketenagakerjaan (BPS, 2022).

Masyarakat Kabupaten Sambas memiliki salah satu budaya unik, yaitu saprahan, yang merupakan tradisi makan bersama dengan duduk di lantai secara berkelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Dalam tradisi saprahan ini memiliki nilai sosial yang dapat mempererat rasa persaudaraan masyarakat Sambas, salah satunya yaitu semangat gotong-royong. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga yang diperlukan untuk mengadakan acara saprahan, sehingga masyarakat harus ikut serta membantu tuan rumah. Tradisi makan saprahan memiliki makna duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Prosesi saprahan begitu kental dengan makna filosofis yang intinya menekankan pada pentingnya kebersamaan, keramah-tamahan, kesetiakawanan sosial, serta persaudaraan. Biasanya tradisi ini dilakukan ketika terdapat acara pernikahan atau acara syukuran lainnya. Kabupaten Sambas merupakan daerah yang masyarakatnya terdiri dari beberapa macam suku bangsa. Suku bangsa mayoritas di Kabupaten Sambas adalah Suku Melayu Sambas. Walaupun Melayu merupakan suku bangsa mayoritas, tetapi Kabupaten Sambas juga menjadi tempat tinggal suku bangsa lainnya seperti Tionghoa, Dayak, Jawa dan Timor.



Gambar 2. Tradisi Adat Saprahan  
 Sumber: Google.com

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada upaya peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Begitu pula dengan Kabupaten Sambas yang mengusung moto “Sambas Baru, Berkemajuan” yang kemudian merumuskan visi pembangunan Kabupaten Sambas “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan visi di atas khususnya bidang kepariwisataan, melalui : Menjadikan kegiatan masyarakat sebagai katalisator dalam kegiatan pariwisata; Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan pariwisata; Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor pariwisata; Mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata; Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; Mempertahankan nilai agama dan budaya lokal.

Dalam Visi dan Misi tersebut, arah pembangunan pariwisata diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, perbaikan dan peningkatan prasarana/sarana dan memberdayakan ekonomi rakyat sehingga kemandirian daerah di era otonomi dapat tercapai, sehingga pembangunan daya tarik wisata akan terus berkembang dan mampu bersaing maupun bersanding dengan destinasi di daerah lainnya dan dapat menciptakan keseimbangan antara kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan yang berdasarkan kepada pariwisata berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Kabupaten Sambas terdapat 118 tempat usaha makan dan minum, 35 hotel/penginapan dengan jumlah kamar 539, serta memiliki lebih dari 74 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Daya tarik wisata ini dalam pemaparan pengembangan pariwisata Kabupaten Sambas dibagi menjadi 4 kawasan wisata yang merujuk kepada Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Sambas Tahun 2016–2036 dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2. Kawasan Pariwisata Kabupaten Sambas

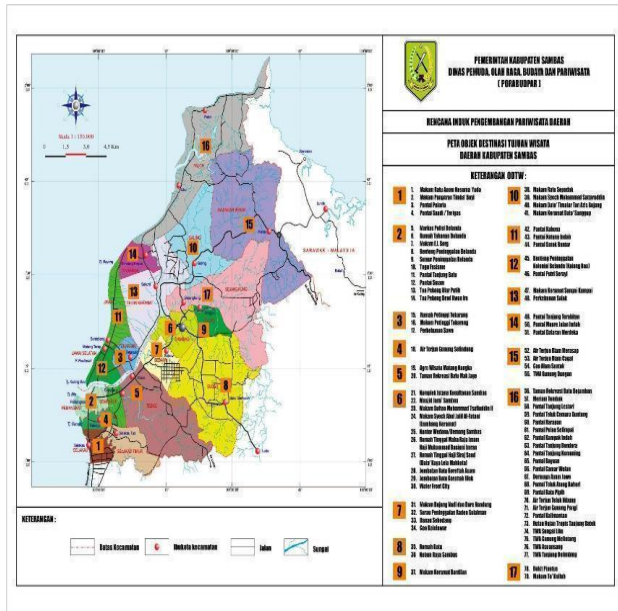
Kawasan Wisata	Wilayah
Kawasan Pariwisata 1: Perbatasan Aruk dan sekitarnya	Kecamatan Galing, Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Tangaran, dan Kecamatan Teluk Keramat.
Kawasan Pariwisata 2: Sambas dan sekitarnya	Kecamatan Sambas, Kecamatan Sajad, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Sejangkung, dan Kecamatan Subah
Kawasan Pariwisata 3: Jawai dan sekitarnya	Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tebas dan Kecamatan Tekarang
Kawasan Pariwisata 4 Gateway dan sekitarnya	Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Pemangkat, dan Kecamatan Semparuk

Sumber: Disparpora Kabupaten Sambas, 2022

Mayoritas daya tarik wisata yang tersebar di Kabupaten Sambas dapat ditemukan berdekatan dengan Proyek Jalan Paralel Perbatasan yang merupakan proyek pembangunan jalan untuk mempermudah akses di kawasan perbatasan. Jalan Paralel Perbatasan Indonesia Malaysia ini membentang sepanjang 1.920 km dengan 607,81 km yang berstatus Jalan Non-Nasional dan 203,51 km lainnya merupakan Jalan Nasional dengan rata-rata lebar jalan 6 dan ruang milik jalan (Rumija) antara 15-25 m. Dari keseluruhan panjang jalan, 811,32 km berlokasi di Kalimantan Barat membentang dari Temajuk hingga Batas Provinsi Kalimantan Barat-Kalimantan Timur. Dikarenakan letak geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maka dari itu sebagian wilayah Kabupaten Sambas dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang (Disparpora, 2022).

Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan telah menetapkan 10 Kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kawasan perkotaan yang diperuntukkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara di Pulau Kalimantan dan salah satu kawasannya adalah PKSN Paloh Aruk. Saat ini perkembangan PKSN Paloh-Aruk di Kawasan Perbatasan Aruk sendiri sudah berkembang dari segi pusat pelayanan utama sekaligus sebagai pusat pelayanan pintu gerbang. Maka dari itu, pada awal tahun 2021, Gubernur Kalimantan Barat mengusulkan secara resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, guna mengakomodir usulan Zona Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh untuk mendorong terwujudnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Entikong, Nanga Badau, dan Paloh Aruk. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi sektor pariwisata Kabupaten Sambas, di mana dengan adanya PLBN Temajuk ini bisa menarik wisatawan mancanegara khususnya asal Sarawak Malaysia, yang mana adanya antusiasme masyarakat Kuching dan Serawak untuk berkunjung ke Teluk Melano yang berbatasan langsung dengan Temajuk sehingga bisa transit ke Temajuk untuk menikmati aktivitas wisata yang lebih beragam dibandingkan daya tarik wisata yang ada di Teluk Melano. Ada beberapa pintu masuk untuk menuju ke Ibukota Kabupaten Sambas, yaitu Kecamatan Sambas sebagai *Distribution Point* bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk menjelajahi daya tarik wisata di Kabupaten Sambas. Untuk wisatawan mancanegara dapat melalui 2 pintu masuk internasional yaitu Pos Lintas Batas Temajuk dan Pos Lintas Batas Negara Aruk.

Wisatawan mancanegara dapat membeli *Road Tax* dan memenuhi syarat administrasi keimigrasian jika ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi pribadi. Untuk pintu masuk wisatawan nusantara bisa melalui Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas. Selain itu, terdapat DAMRI Trans Kalimantan melintasi Kalimantan dari timur ke barat, tepatnya dari Simanggaris desa terujung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur hingga di Desa Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. DAMRI ini juga melewati PLBN Aruk, menembus Biawak, negara bagian Sarawak, Malaysia.



Gambar 3. Peta Objek Daya Tarik Kabupaten Sambas  
 Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas, 2017

Daya tarik wisata yang tersebar di Kabupaten Sambas didominasi oleh wisata bahari, di mana Kabupaten Sambas memiliki panjang garis pantai sejauh 198,76 km dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kecamatan Selakau) hingga Tanjung Datok (Kecamatan Paloh) dan 102,5 km panjang garis pantai berada di Kecamatan Paloh (Lapan, 2013). Di Kecamatan Paloh terdapat pantai dengan zona peneluran penyu terpanjang di Indonesia yaitu sejauh 63 KM yang terbentang dari Pantai Selimpai hingga Pantai Bayuan. Namun ancaman abrasi pantai di Kabupaten Sambas ini sangatlah tinggi yang diakibatkan karena adanya pergerakan sedimen yang disebabkan oleh arus sejajar pantai (*longshore current*) yang dibangkitkan oleh gelombang datang dan gelombang pecah yang tidak tegak lurus dengan garis pantai (gelombang datang dominan dari arah barat). Sedimen di sepanjang pantai tersebut terbawa arus akibat aktivitas pasang surut dan gelombang.

Selain mengandalkan wisata bahari, Kabupaten Sambas juga memiliki berbagai potensi wisata lain, seperti wisata pegunungan dengan tiga Taman Wisata Alam antara lain TWA Gunung Melintang, TWA Gunung Asuansang, dan TWA Gunung Dungan dengan tipe vegetasi hutan kerangas, hutan rawa gambut, dataran rendah, sampai tipe vegetasi puncak, dihuni oleh beragam macam flora dan fauna. Selain itu, merujuk pada Ripparkab Sambas tahun 2016-2036, Ekowisata Daerah Aliran Sungai (DAS) juga merupakan salah satu jenis wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sambas. Dengan dua sungai besar mengalir yaitu Sungai Paloh dan Sungai Sambas. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sambas mencakup total hamparan 516.200 ha, terdiri atas DAS Paloh sepanjang 64.375 ha, DAS Sambas sepanjang 258.700 ha, DAS Sebangkau sepanjang 193.125 ha, dan DAS Salakau sepanjang 190.155 ha.

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Sambas pada tahun 2021 tercatat sejumlah 22.082 wisatawan, sumber data kunjungan wisatawan ini diperoleh dari kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang menginap di hotel/penginapan di Kabupaten Sambas. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sambas terlihat menurun, di mana

pada tahun 2018 kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sambas sekitar 121.399 wisatawan, tahun 2019 terdapat 60.082 wisatawan, dan tahun 2020 terdapat 22.597 wisatawan (Disparpora, 2022).

Menurunnya kunjungan wisatawan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan yang paling signifikan adalah faktor pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan wisatawan dan juga penutupan perbatasan negara.

Dalam pengembangan pariwisatanya, Kabupaten Sambas juga memiliki beberapa organisasi kepariwisataan di antaranya ada 24 kelompok sadar wisata dan POKDARWIS, 1 organisasi GenPi atau Generasi Pesona Indonesia, 1 organisasi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan 2 organisasi POKMASWAS atau Kelompok Masyarakat Pengawas sebagai enumerator penyulu. Namun, meskipun demikian masih terdapat permasalahan kepariwisataan yang dialami oleh Kabupaten Sambas, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan serta partisipasi masyarakat di sektor pariwisata, terbatasnya sarana dan prasarana pembangunan kepariwisataan, terbatasnya anggaran untuk pembangunan kepariwisataan baik pembangunan sarana maupun sumber daya manusia kepariwisataan, masih rendahnya tingkat kapasitas dan daya saing masyarakat di sektor pariwisata dan pembangunan kepariwisataan belum dilaksanakan secara komprehensif integral.

Saat ini, pariwisata di Kabupaten Sambas menghadapi saingan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, terdapat Kota Singkawang yang bersebelahan dengan Kabupaten Sambas. Kota yang berbatasan dengan Laut Natuna, Gunung Roban, Pasi, Raya, Gunung Poteng dan Sakok ini dikenal dengan banyak sebutan mulai dari Kota Amoi, Kota Seribu Kelenteng, hingga Hongkong van Borneo. Selain itu ada daerah-daerah dari negara tetangga, Malaysia, yang juga menyaingi pariwisata Kabupaten Sambas. Kota Kuching yang berlokasi di negara bagian Serawak memiliki berbagai daya tarik wisata alam, budaya, hingga medis dan sejarah. Masih berlokasi di Serawak dan hanya berjarak kurang lebih 10 menit dari Pos Perbatasan Temajuk, yaitu Telok Melano di Malaysia. Daerah ini terkenal dengan pantai yang menyajikan *view* matahari terbit atau *sunrise viewpoint* yang indah. Hal tersebut menjadikan pariwisata di Malaysia dapat dikatakan lebih unggul saat ini ialah aksesibilitasnya yang sudah sangat mudah dengan kondisi jalan beraspal dan informasi yang tersedia dengan kemudahan jaringan internet.

**Koneksi PLBN ke Destinasi lainnya**

Lokus pengembangan pariwisata Kabupaten Sambas terbagi menjadi dua pola, yaitu pola kawasan dengan pendekatan konsep kawasan (populer dengan sebutan desa wisata) dan pola *site* dengan konsep *satellite* (konsep satu DTW sebagai *business centre* bagi lingkungan sekitarnya). Pada pola kawasan, Kabupaten Sambas menetapkan 5 lima fokus pengembangan kawasan, yaitu Desa Temajuk, Desa Sebusub, Desa Jawai Laut, Desa Piantus, dan Desa Sumber Harapan. Pada pola kawasan ini terdiri dari kumpulan DTW pada satu sistem administrasi desa. Sedangkan pada pola *site*, Kabupaten Sambas menetapkan 5 lima fokus pengembangan dengan pendekatan *satellite* yaitu DTW Istana Alwatzikhoebillah, Danau Sebedang, Matang Danau, Gunung Senujuh dan Pantai Sinam.

Sektor pariwisata di Kabupaten Sambas masih merupakan sektor potensial, karena sebagian keberadaannya belum dapat menghasilkan pendapatan baik kepada pemerintah maupun

kepada masyarakat, kecuali pada beberapa titik tertentu yang telah memiliki agenda atau kegiatan kepariwisataan yang umumnya didominasi turis lokal di hari libur. Kalender kepariwisataan juga belum tersusun dengan rapi sebagian besar masih bersifat musiman dan belum menjadi agenda pariwisata daerah.

Karakter destinasi di Kabupaten Sambas ini didominasi oleh wisata alam, budaya hingga kuliner. Pada beberapa destinasi telah didukung oleh keberadaan jasa akomodasi sehingga turis dapat melaksanakan aktivitas dengan nyaman di destinasi. Keberadaan akomodasi di destinasi tidak hanya menyediakan tempat menginap bagi para wisatawan, tetapi juga memberikan pendapatan kepada daerah, membuka lapangan kerja, dan menimbulkan ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar.

Hingga saat ini, terdapat sebanyak 41 usaha akomodasi di Kabupaten Sambas hingga tahun 2021 dengan tingkat hunian kamar 33,53% dengan kamar tersedia sebanyak 539 kamar. Jumlah resto atau tempat makan yang tersebar di Kabupaten Sambas sebanyak 448 buah dengan total tempat 586 lokasi. Jumlah DTW sebanyak 90 buah, meningkat sebanyak 21 DTW dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 69 DTW sebanyak 15 di antaranya dikelola oleh Pemkab, 53 dikelola Pemdes dan sebanyak 22 DTW dikelola instansi pemerintah lainnya. DTW tersebut dibagi menjadi 58 DTW alam, 29 DTW budaya dan 3 DTW buatan. Soal kelembagaan pariwisata, selain Pokdarwis yang merupakan kelembagaan organik destinasi; juga ada 1 Genpi dan 1 PHRI, sementara Lembaga lainnya yang berhubungan dengan kepariwisataan masih belum terbentuk.

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa destinasi saat ini telah dan sedang berbenah. Salah satunya di JS Temajok, di mana investor sedang mempersiapkan destinasi yang cukup bagus dengan segala macam sarana pelengkapannya, seperti hotel, resto, kolam pemancingan, lahan parkir yang luas dan taman laut yang asri dan nyaman.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Potensi yang besar ini akan berdampak cukup besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas apabila dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Berangkat dari destinasi yang sudah terkenal itu, pemandu wisata, agen perjalanan, dan lainnya dapat menawarkan kunjungan ke tiga destinasi lainnya sehingga aktivitas turis bertambah dan pengeluaran untuk kegiatan di destinasi juga akan bertambah. Inilah yang disebut sebagai interkoneksi antar destinasi. Dampak positif dari interkoneksi destinasi adalah bertambahnya lama tinggal dan pengeluaran turis untuk aktivitas kepariwisataan. Interkoneksi tersebut telah dibuat oleh Dinas Pariwisata sebagaimana gambar berikut. Kawasan Pariwisata (KP) 1 meliputi Aruk dan sekitarnya, Galing, Paloh, Sajingan Besar, Tangaran dan Teluk Keramat; KP2 meliputi destinasi Sambas, Sajad, Sejangkung, dan Subah; KP3 meliputi Jawai dan sekitarnya di antaranya Jawai, Jawai Selatan, Pemangkat dan Semparuk; dan KP4 yang disebut *gateway* (pintu masuk) yang meliputi Selakau, Selakau Timur, Pemangkat dan Semparuk. Namun, KP-KP dimaksud belum berjalan, sehingga sangat disayangkan ketika Perda ini tidak dilaksanakan oleh para pihak (ASITA, PHRI, HPI, Genpi dll), sementara dukungan

pemerintah dan masyarakat sudah sangat massif dalam memajukan industri pariwisata di Kabupaten Sambas.

Terkait pengembangan usaha pariwisata ke depan; terdapat beberapa kendala yang dialami daerah ini, antara lain:

1. Pembangunan kepariwisataan belum dikelola secara maksimal, baik dari segi penyiapan sarpras, SDM, kelembagaan dan unsur penunjang lainnya.
2. Peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal.
3. Belum tersedianya pola pengembangan kepariwisataan Sambas secara komprehensif.
4. Tingkat kesadaran masyarakat (terkait legalitas) destinasi masih rendah.
5. Belum tersedianya paket wisata yang dikelola secara professional.

Paket wisata menjadi penting diupayakan melalui kerjasama dengan agen perjalanan wisata yang tersebar di Indonesia pada umumnya di Kalimantan Barat pada khususnya; yang disambut dengan agen perjalanan wisata daerah.

Akibat kendala ini, maka lama tinggal turis menjadi tidak tercapai. Dari 5 hari yang direncanakan, hanya mendapat 1,4 hari kunjungan sehingga sisanya diserap oleh destinasi di luar Kabupaten Sambas. Akibat dari lama tinggal turis yang tidak optimal, maka *willing to pay* dari wisatawan tidak terserap seluruhnya sehingga terjadi *lost income* yang jumlahnya mencapai Rp 95,624,000,000.00 dari perhitungan *baseline* tahun 2019 sd 2021.

Nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin membelanjakan untuk barang dan jasa guna memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal konsep ini disebut keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini maka nilai ekologis ekosistem bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa. Jadi, konsep WTP ini terkait erat dengan konsep *compensating variation* dan *equivalent variation* dalam teori permintaan. Jadi WTP dalam industri pariwisata berhubungan dengan jumlah maksimal seseorang (wisatawan) mau membayar aktivitas atau paket destinasi wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Joko Prasetyo dan Endah Saptutyingsih tahun 2013 di Sleman menghasilkan perhitungan WTP sebesar antara Rp 3.000 sd 10.000 per aktivitas dari biaya yang dialokasikan pada setiap perjalanan wisata antara Rp 50.000 sd Rp 300.000. Namun, umumnya, biaya perjalanan ke destinasi di Indonesia sebesar Rp 150.000 per orang per kali kunjungan, yang dihitung dari kota pusat destinasi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hisan, Syechalad dan Syahnur (2014) melalui Uji *Contingen Valuation Method* (CVM) menghasilkan WTP sebesar Rp 30.000 dengan signifikansi di atas 0,05. Biaya disediakan untuk kegiatan menuju destinasi sebesar Rp 150 sd 300 ribu per orang per kunjungan. Oleh karena itu, lebih mudah menggunakan hasil penelitian ini dalam menghitung WTP untuk destinasi di Kabupaten Sambas.

Tabel 3. Penerimaan PAD Kabupaten Sambas dari Hotel dan Restoran Tahun 2016 sd 2021

Tahun	Hotel (Rp)	Restoran (Rp)	Total (Rp)
2016	424,298,100	2,060,763,160	2,485,061,260
2017	525,596,250	2,310,970,460	2,836,566,710
2018	538,871,200	3,072,331,300	3,611,202,500
2019	665,761,250	3,692,458,680	4,358,219,930
2020	404,546,040	3,171,269,800	3,575,815,840
2021	502,792,300	4,363,301,040	4,866,093,340

Sumber: Bakauda Kabupaten Sambas, 2022

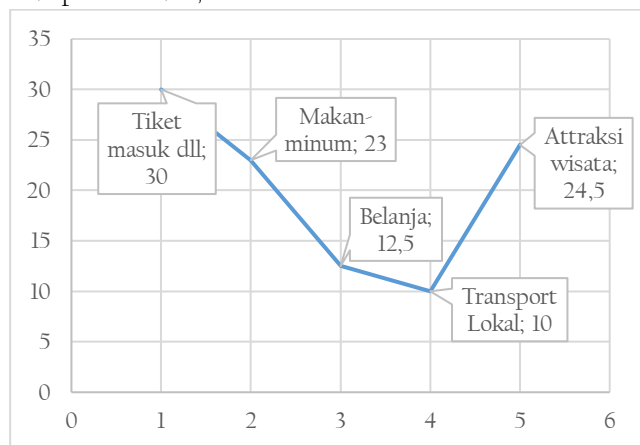
Merujuk pada Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan destinasi tidak berdampak signifikan pada penerimaan daerah dari seKtor ini. Seakan terbaca hanya hotel dan restoranlah yang memberi kontribusi pada penerimaan daerah. Oleh karena itu, simpulan ini menjadi tidak adil.

Hasil penelitian Erdi (2011), pengeluaran turis yang dibedakan antara turis mancanegara dengan turis nusantara. Turis manca rela menghabiskan sebesar Rp 500 ribu di destinasi, sementara turis nusantara Rp 300 per kunjungan (lihat grafik). Riset ini hanya mengambil pengeluaran turis nusantara karena turis manca tidak ditemukan selama riset berlangsung maka perhitungan untuk turis manca menggunakan hasil penelitian Erdi tersebut berdasarkan data yang tersaji pada halaman 104. Dari data ini, lama tinggal wisatawan di Sambas hanya 1,4 hari dari 3 hari yang direncanakan, kemudian diformulasi penerimaan yang semestinya diterima oleh masyarakat dari kedatangan turis; ketika data kunjungan tahun 2018 sd 2020, untuk wisman sebanyak 64.610 orang dan wisnus 152.842 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Penerimaan Masyarakat dari Kedatangan Turis ke Kabupaten Sambas Tahun 2018 sd 2020

Tahun	Wisman	Wisnus	Penerimaan Masyarakat Dari (Rp)	
			Turis Nusantara	Turis Manca
2018	21,909	99,490	6,572,700,000.00	49,745,000,000
2019	33,586	26,496	10,075,800,000.00	13,248,000,000
2020	9,115	26,496	2,734,500,000.00	13,248,000,000
Total	64,610	152,482	19,383,000,000.00	76,241,000,000
			95,624,000,000.00	

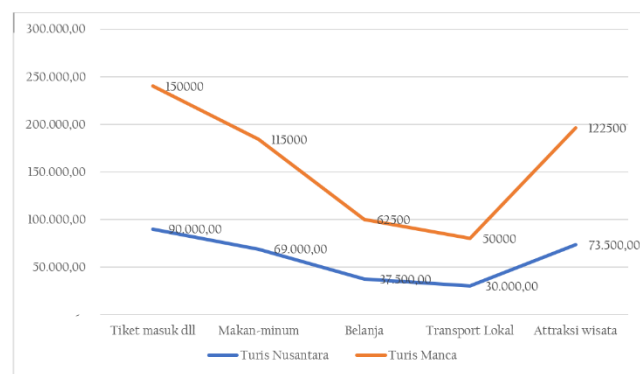
Gambar 4. Persentase Pengeluaran Turis di Destinasi Kabupaten Sambas, Tahun 2022



Sumber: Peneliti, dengan formulasi riset sebelumnya, 2022

Dari distribusi persentase di atas maka struktur pengeluaran turis didistribusikan seperti grafik berikut:

Gambar 5. Distribusi Pengeluaran Turis Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2022



Sumber: Peneliti, dengan formulasi riset sebelumnya, 2022

**Kerangka Kebijakan Daerah**

Kerangka kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata adalah:

**Pertama**, daerah mendorong destinasi berkembang terlebih dahulu dengan memprioritaskan wisatawan lokal berkunjung.. Kemudian, mereka disarankan wisatawan untuk membuat konten, kesan dan pesan yang diposting di berbagai media dengan melakukan tag pada akun destinasi, dinas dan lain sebagainya. Pengunjung yang berkemampuan berbahasa Inggris, dapat membuat posting konten dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sementara lainnya membuat konten dalam Bahasa Indonesia. Isi konten adalah pengalaman menarik yang pada akhirnya dapat menggugah calon pengunjung untuk datang ke destinasi.

**Kedua**, respon dan dukungan pemerintah yang merupakan faktor krusial dalam upaya penyelamatan semua industri tak terkecuali industri yang berkaitan dengan kepariwisataan.. Hampir semua pemerintahan di dunia ini memberikan stimulus kebijakan untuk penyelamatan industri pariwisata. Indonesia sendiri bahkan sudah menggelontorkan hampir Rp 3,3 triliun pada 2020 guna pemulihan pariwisata nasional melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sebesar Rp 2 triliun untuk Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Selain itu, ada juga stimulus sebesar Rp 400 miliar untuk program terkait pemberdayaan UMKM dan sektor pariwisata lokal. Oleh karena itu, dipandang penting bagi daerah untuk menyambung program-program nasional ini sehingga terjadi “pengeroyokan program” yang bertujuan untuk pemulihan dan penguatan industri lokal.

**Ketiga**, inovasi teknologi yang akan menjadikan pariwisata sebagai industri yang lebih fleksibel. Digitalisasi pariwisata khususnya pada masa pandemi harus sesegera mungkin dilakukan. Salah satu program digitalisasi pariwisata yang diluncurkan oleh Menparekraf pada Maret 2021 lalu adalah peluncuran Go Mandalika, yang merupakan platform digital pariwisata (e-tourism). Pemerintah Kabupaten Sambas hendaknya menyambung platform tersebut dengan menduniakan Temajok sebagai destinasi di ujung negeri sebagaimana ditemui pada buku “Paloh: Sepenggal Surga di Ujung Barat Kalimantan” agar lebih mendunia dengan jenis wisata minat khusus, wisata bahari dan wisata budaya. Platform tersebut hendaknya

terintegrasi dan diintegrasikan menjadi satu sistem *e-tourism* secara nasional.

**Keempat**, menjadikan destinasi sebagai milik semua, meskipun berada di daerah dan dijadikan sebagai "penyelamat" dalam industri pariwisata *pasca* Covid-19. Sebagian destinasi masih memiliki alam dengan kondisi natural (hutan dan ekosistem asli), dan itu dapat dijadikan sebagai konsekuensi dari "one world" di mana destinasi menyediakan oksigen untuk perbaikan paru-paru dunia yang pantas diberikan pembiayaan oleh pemerintah pada negara-negara yang gagal dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (Singer, 2022). Selama ini, Indonesia diprotes habis-habisan oleh negara-negara luar atas laju deforestasi yang terjadi pada hutan-hutan kita, namun penghargaan kepada masyarakat yang telah melestarikan hutan juga tidak banyak didukung. Sesuai dengan konsep *The Kyoto Protocols*, emisi yang diserap oleh destinasi dari ketersediaan hutan dapat dikonversi untuk perbaikan lingkungan melalui "carbon trading". Ketika proses konversi itu terjadi maka keberadaan destinasi akan mudah terkenal se-antero dunia.. Akan ada banyak wisman yang berhasrat untuk datang ke destinasi dan kedatangan mereka akan mendatangkan devisa negara, sementara dana dari hasil konversi dapat menggantikan penerimaan daerah dari tiket masuk ke destinasi. Biaya konversi karbon itu dapat digunakan oleh daerah untuk perbaikan tidak hanya lingkungan tetapi juga kesejahteraan. Pastinya, keberadaan proyek konversi karbon tersebut akan "membuat" wisatawan heboh dan berminat untuk melihat implementasi dari proses konversi tersebut.

Penerimaan daerah dari keberadaan destinasi didesain dalam kebijakan internal yang tidak terlihat oleh turis. Harga yang dibayar oleh turis dari transaksi turis di destinasi sudah termasuk harga penerimaan daerah yang sedemikian rupa tidak terlihat oleh turis. Oleh karena itu, proses awal untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata adalah meningkatkan kunjungan ke destinasi, sementara PAD didesain sedemikian rupa tidak terlihat sebagai bentuk pengeluaran turis atas aktivitas mereka di destinasi.

## KESIMPULAN

Pemerintah daerah Kabupaten Sambas masih belum mampu menangkap peluang untuk menarik PAD dari aktivitas turis karena hingga saat ini, peluang tersebut terlewatkan tanpa pernah direalisasikan. Koneksi antara destinasi yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lama tinggal turis tidak meningkat dan bahkan diambil oleh daerah lain teruma Kota Pontianak. Fokus utama Pemda Sambas tidak menarik retribusi atau *fee* tiket masuk ke destinasi, melainkan mendorong kunjungan dan stabilitas kunjungan ke destinasi. Penerimaan daerah dari keberadaan destinasi didesain dalam kebijakan internal yang tidak terlihat oleh turis, sehingga harga yang dibayar turis dari transaksi aktivitas dan pelayanan di destinasi sudah termasuk harga penerimaan daerah; yang sedemikian rupa tidak terlihat oleh turis. Oleh karena itu, proses awal untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata adalah meningkatkan kunjungan ke destinasi, sementara PAD didesain sedemikian rupa tidak terlihat sebagai bentuk pengeluaran turis atas aktivitas mereka di destinasi. Peluang yang terlewatkan itu dihitung dari ketidakmampuan Pemda Kabupaten Sambas dalam memperlama tinggal turis. Wisatawan semula merencanakan tinggal 5 hari hanya bertahan 1.5 hari sehingga potensi penerimaan yang hilang pada

tahun 2018 sd 2020 sangat besar. Pemda melihat kedatangan turis ke destinasi favorit belum sebagai peluang bagi penambah penerimaan daerah, namun kedatangan mereka telah memberi kontribusi pada perputaran uang di daerah dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya di destinasi.

## REFERENSI

- BPS Kabupaten Sambas, (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun*. Badan Pusat Statistik.
- Anggraheni, S., Nurjaman, A., & Kamil, M. (2022). Village Institutional Transformation to Smart Village Governance in Tourism Village Development. *Jurnal Public Policy*, 8(2), 73. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i2.4767>
- Arifin, N. (2012). Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi. *Ilmiah*.
- Asmarani, M., Suni, B., & Nugrahaningsih, N. (2013). Kerjasama Sosial dan Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosekmalindo)(Studi Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas). , 1. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*.
- Dewi, D. N., & Adi, S. W. (2021). Analisis Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2018). In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 702–711. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5226>
- Erdi. (2011). Peran Pemerintah Dalam Industri Pariwisata dan Perwujudan Kesejahteraan Rakyat Daerah: Studi Kasus Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kepariwisataan di Kota Singkawang. *Jurnal Ilmu Administrasi- JIA*, 1(02).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Gamal, S. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: andi.
- Herizal, H., Rasanjani, S., & Muhkrijal, M. (2021). Kebijakan Kepariwisataan di Provinsi Aceh: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3341>
- Mayasari, I. (2021). Analisis Potensi Wisata Kuliner Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Pontianak Kalimantan Barat. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jppvlii.01>
- Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data analysis: a Method Sourcebook Edition 3*. SAGE Publications.
- Muhammad Syaifullah, B. W. (2016). *Pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagai Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat Sekitar di Kota Pontianak Kalimantan Barat*. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian (cetakan ketujuh)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, D. M. (2016). Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pawiwisata. 8(1).. *Jurnal Geografi Gea*, 24-32.
- Nur, Djakaria M. (2016). Otonomi Daerah Dalam Pengembangan Sektor Pawiwisata. In *Jurnal Geografi Gea* (Vol. 8, Issue 1). Universitas Pendidikan Indonesia. <https://doi.org/10.17509/gea.v8i1.1688>
- Nuraini, N., Asriati, N., & Khosmas, F. Y. (2020). Pengaruh Pengunjung Lokasi Pariwisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten

- Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*.
- Pitana, I. G. and G. P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Penerbit Andi.
- Sabahan, S., & Yuliansyah, Y. (2017). Kajian Daya Saing Sektor Pariwisata Kabupaten Sambas. , 5(2). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 274-278.
- Saputra, K. (2017). Perancangan sistem informasi pariwisata berbasis website sebagai media promosi di singkawang-kalimantan barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1).
- Singer, P. (2022). *One World: The Ethics of Globalization*. Yale University Press.
- Yadi, N. H., Negara, A. B. P., & Safriadi, N. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Objek Pariwisata Pada Daerah Kalimantan Barat Menggunakan Logika Fuzzy. *JUSTIN (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 220-225.
- Yoety, O. A. (2008). *Ekonomi pariwisata: introduksi, informasi, dan aplikasi*. Penerbit Buku Kompas.